

ANALISIS KOMPARATIF PERTUMBUHAN PENDAPATAN DAERAH DI LIMA WILAYAH ADAT TAHUN 2012 – 2018 PROVINSI PAPUA

Rachmaeny Indahyani¹

rachmaenyindahyani@feb.uncen.ac.id

Robert M.W.S.T Marbun²

ABSTRACT

Rachmaeny Indahyani. 2018, “*Analisis Komparatif Pertumbuhan, Pendapatan di Lima Wilayah Adat Tahun 2012 – 2018 Provinsi Papua.*” This research generally have aims to analisys income growth comparative in five customary territory since 2012 – 2018 at Papua Province. Data be used in secondary data, The method be used to analysis with make discreption kualitatif and finally the output analysis will be kuantitatif, The result of analysis is 1) the research found different level of independence between region it's mean inequality in independency. This attention for government Provinsi to take policy for equality in five customary territory 2) Approach strategy or policy of developmend regional in five customary territory is depend on actor in implementation decession maker, komitmen, for to the aims of policy.

Keywords: *growth, comparative income and five customary territory in Provinsi Papua*

PENDAHULUAN

APBN dan APBD adalah instrument yang dipakai untuk mewujudkan cita –cita dari kemerdekaan Republik Indonesia dan tujuan dari pembangunan ekonomi yaitu untuk mewujudkan “Masyarakat Adil , makmur dan sejahtera” sejak masa reformasi tahun 2001 sampai sekarang telah terjadi banyak perubahan dalam struktur pemerintahan. Dari system sentralistik menjadi desentralisasi. Yang disertai dengan perubahan pada peraturan dan dasar hukum yang berlaku. Banyak terjadi perubahan pada pembangunan yang terjadi pada umumnya, khususnya perubahan pada pembangunan ekonomi. Seiring dengan berubahnya struktur pemerintah disertai dengan perubahan dari APBN maupun APBD khususnya di Provinsi Papua.

Realisasi APBN di lingkup Provinsi Papua dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, baik pada pos pendapatan maupun pada pos belanja. Pada tahun 2018 sumber pendapatan terbesar berasal dari pajak dalam negeri, sementara itu realisasi belanja terbesar berasal dari belanja modal.

Selain itu realisasi APBD Papua di tahun 2017 secara umum mengalami peningkatan. Realisasi pendapatan dan belanja mengalami peningkatan secara nominal maupun presentase realisasi. Berdasarkan pangasanya, postur pendapatan APBD Papua mayoritas berasal dari dana otonomi khusus dari sisi belanja peningkatan terbesar berasal dari belanja tidak langsung. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Dengan adanya peningkatan pada pendapatan maupun belanja daerah seharusnya disertai dengan adanya perubahan pada pembangunan disegala bidang yang disertai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada umumnya., peningkatan kesejahteraan masyarakat identik dengan adanya perbaikan infrastruktur, perbaikan di bidang kesehatan, perbaikan dibidang pendidikan dan keamanan. Hal ini bisa direalisasi dengan cara menetapkan arah dann strategi kebijakan fiskal menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan.

Provinsi Papua memiliki tantangan utama dalam masalah distribusi adalah Bagaimana mengurangi masalah kesenjangan antar dan inter daerah hal ini disebabkan karena terbatasnya dukungan infrastruktur transportasi baik secara kuantitas maupun secara kualitas hal ini dapat terlihat dengan adanya fakta masih

¹ Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Uncen

² Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Uncen

adanya masyarakat yang terisolir, ketimpangan bidang ekonomi, ketimpangan dibidang social dan adanya potensi konflik social.

Kondisi ini tentunya menjadi bagian yang perlu dipahami dengan baik sehingga dapat diperoleh gambaran secara jelas bagaimana pertumbuhan dan distribusi dari pendapatan dan belanja daerah khususnya dilima wilayah adat Provinsi Papua.

Dengan latar belakang tersebut , penelitian ini mencoba untuk membahas bagaimana gambaran perbandingan pertumbuhan, distribusi pendapatan dan belanja daerah serta masalah dan strategi kebijakan dalam menyelesaikan masalah pertumbuhan dan masalah distribusi yang berpengaruh bagi pembangunan ekonomi di daerah khususnya dilima wilayah adat Provinsi papua, melalui suatu penelitian yang berjudul “Analisis Komparatif Pertumbuhan, Distribusi Pendapatan dan Belanja Daerah di Lima Wilayah Adat Provinsi Papua”

Perumusan Masalah

1. Bagaimana analisis komparatif pertumbuhan pendapatan daerah dilima wilayah adat Provinsi Papua dari tahun 2013 – 2018?
2. Bagaimana Strategi dan kebijakan pertumbuhan Pemerintah Provinsi Papua di Lima Wilayah Adat?

Tujuan Penelitian

1. Tujuannya secara umum adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang perbandingan pertumbuhan pendapatan Daerah di lima wilayah adat Provinsi Papua serta strategi kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Papua di lima wilayah adat
2. Tujuan Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai dari studi ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis komparatif pertumbuhan pendapatan daerah dilima wilayah adat Provinsi Papua dari tahun 2013 – 2018
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis Strategi dan kebijakan Pertumbuhan Pemerintah Provinsi Papua di lima wilayah adat.

Urgensi (Keutamaan) Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah provinsi pada umumnya dan pemerintah daerah khususnya, dapat diperoleh gambaran secara jelas bagaimana pertumbuhan dari pendapatan daerah khususnya dilima wilayah adat Provinsi Papua.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Peta Jalan Penelitian

Dalam pengembangannya, penelitian ini berkedudukan pada penelitian sebelumnya dan diharapkan mampu dikembangkan menjadi sebuah model pengembangan yang baik dan berkelanjutan.

Adapun peta jalan dalam penelitian ini sejalan dengan rencana induk penelitian Universitas Cenderawasih Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut: Tujuan Utama dari penelitian adalah terciptanya tenaga ahli dibidang keuangan daerah, kami tim peneliti di bidang konsentrasi keuangan daerah berusaha meningkatkan keahlian dalam memahami tentang fungsi dan peranan APBN dan APBD dalam meningkatkan pembangunan di daerah maupun pembangunan di tingkat Nasional. Untuk bisa mewujudkan hal tersebut tim peneliti berusaha ingin meneliti agar dapat lebih memahami mengenai hal – hal yang berkaitan dengan APBN dan APBD, seperti pemahaman mengenai dasar hukum, permasalahan yang berkaitan dengan proses perencanaan, pengelolaan, Monitoring dan evaluasi Keuangan daerah APBD dan APBN, lebih spesifik pada komponem pendapatan, komponem Belanja dan Komponem pembiayaan.

Tabel 1.

Peneliti Terdahulu

| | Penelitian Terdahulu | Penelitian Sekarang | Tindak Lanjut Penelitian |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Implementasi kebijakan dalam penggunaan dana APBD Dana DAK Kabupaten Jayawijaya TA 2012 -2014. 2. Analisis Hubungan Pendapatan daerah dan Belanja Daerah serta pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Jayapura TA 2003 – 2014 3. Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Jayapura tahun 2015 4. Analisis Kontribusi Efektivitas Laba BUMD terhadap PAD di Provinsi Papua Tahun 2016 5. Analisis Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Jayapura Tahun 2017 6. Analisis Flying paper effect Pengelolaan Keuda di Kota Jayapura Tahun 2017 | <p>Analisis Komparatif pertumbuhan, distribusi pendapatan dan belanja di lima wilayah Provinsi Papua Tahun 2013 - 2018</p> | <p>Analisis kinerja keuangan Pemda melalui evaluasi struktur APBD di Provinsi Papua</p> |

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Papua khususnya di Lima Wilayah Adat yaitu: MAMTA, LAPAGO, MEEPAGO, SAERERI DAN HANIM HA.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, guna mendukung analisis yang akan dilakukan adalah data kuantitatif dalam bentuk satuan rupiah, berupa pendapatan dan belanja di lima wilayah adat provinsi Papua. Sumber data dalam penulisan ini adalah: Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dinas dan instansi terkait yaitu Badan Pusat statistic dan BAPEDA Provinsi Papua.

Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan pada kajian ini dilakukan dengan cara: Studi kepustakaan (library research) dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data, berupa; dokumen laporan juga digunakan buku-buku, karangan ilmiah dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan Pertumbuhan dan distribusi APBD dan APBN.

Metode Analisis data

Alat analisis yang digunakan dalam pembahasan adalah kuantitatif ,

- a. Untuk menjawab masalah pertama yaitu analisis komparatif pertumbuhan pendapatan dan belanja alat analisis yang dipakai adalah:

Pertumbuhan Pendapatan Daerah

$$= \frac{\text{Pendapatan Daerah}_t - \text{Pendapatan Daerah}_{t-1}}{\text{Pendapatan Daerah}_{t-1}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Komparatif Pertumbuhan Pendapatan Daerah di lima Wilayah Adat Provinsi Papua dari Tahun 2012 – 2018

1. Pertumbuhan Pendapatan Daerah di Lima Wilayah Adat

Analisis komparatif pertumbuhan pendapatan di lima wilayah adat menggunakan pendekatan analisis kinerja dan kemampuan keuangan daerah khususnya analisis kinerja pendapatan daerah. yaitu analisis kemandirian, analisis tingkat ketergantungan dan analisis pertumbuhan ekonomi.

Karena dengan menggunakan **pendekatan Kinerja dan kemampuan keuangan** daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah (Halim, 2004). Pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah menyangkut tiga bidang analisis yang saling terikat satu sama lain: analisis penerimaan, analisis pengeluaran dan analisis anggaran. Untuk menilai pertumbuhan pendapatan daerah digunakan pendekatan analisis penerimaan yang di lihat dari tingkat kemandirian dan tingkat keterantungan serta pertumbuhan ekonomi.

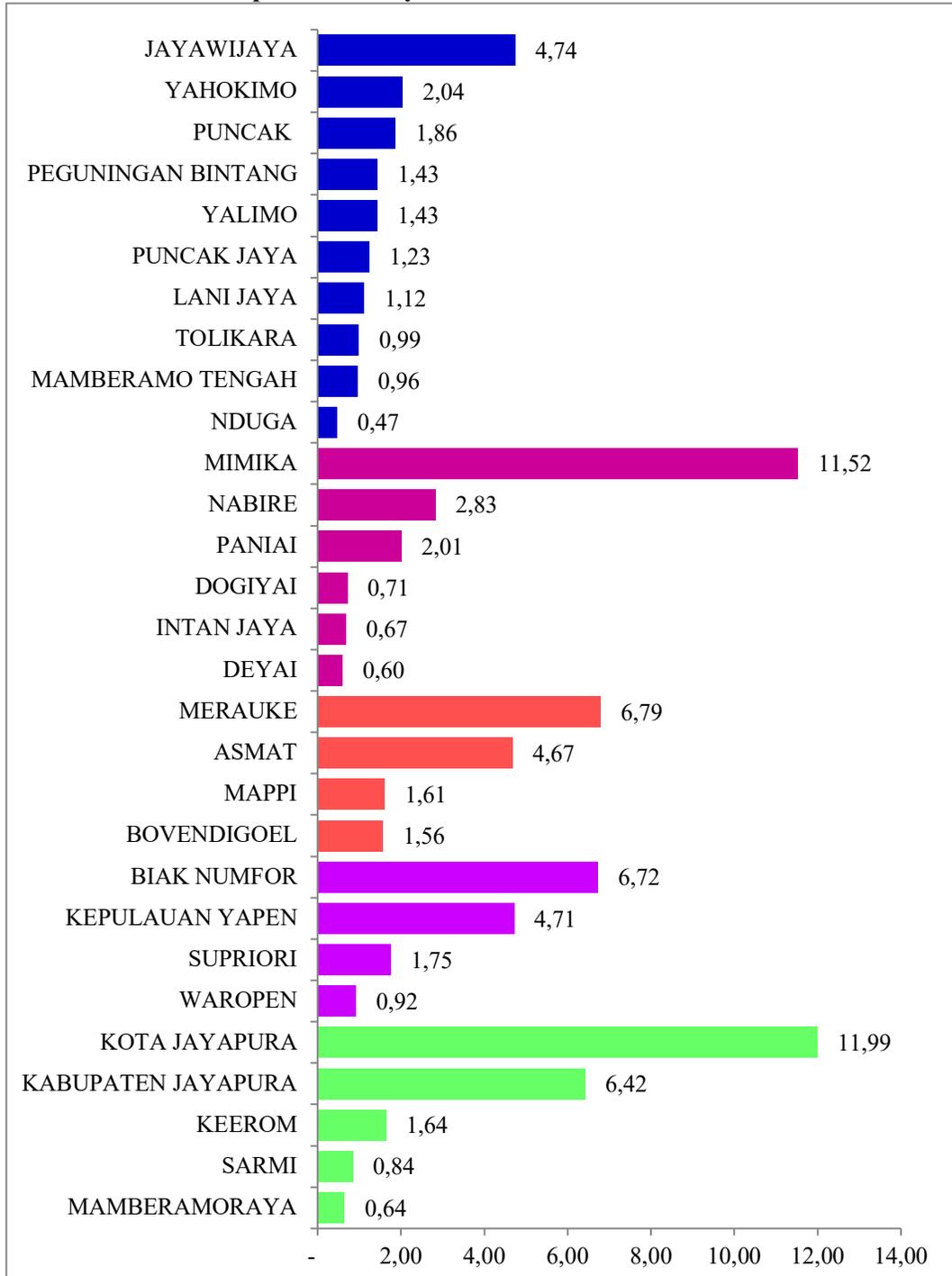
Kemandirian fiskal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbandingan antara PAD dengan total pendapatan daerah kabupaten/kotayang dikelompokkan berdasarkan lima wilayah adat di provinsi Papua dari tahun 2012 – 2017, yang menggambarkan adanya pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintah yang lebih tinggi dan menentukan belanja daerah. Dengan tujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kemandirian fiskal menggambarkan kemampuan pemerintah dalam meningkatkan PAD, dimana Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna memenuhi kebutuhan belanja daerah, yang bersumber dari pajak, retribusi, bagian laba usaha milik daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Gambar 5.1 menjelaskan bagaimana pertumbuhan rata –rata tingkat kemandirian fiskal di Provinsi Papua dari tahun 2012 – 2017 yang terdiri dari semua kabupaten diwilayah lima adat yaitu, MAMTA, Sireri, Meepago, Lapago dan Anim Ha. Kota Jayapura dengan tingkat kemandirian 11.99 yang merupakan wilayah adat Mamta memiliki tingkat kemandirian fiskal tertinggi sedangkan Kabupaten Nduga dengan tingkat kemandirian 0.47 yang merupakan bagian dari wilayah adat Lapago memiliki tingkat kemandirian fiskal yang terendah. Hal ini bisa disebabkan karena banyak faktor salah satunya adalah Kota Jayapura merupakan pusat pemerintahan sedangkan Kabupaten Nduga merupakan daerah pemekaran baru.

Di Wilayah adat lapago kabupaten Jayawijaya memiliki tingkat kemandirian yang tertinggi dengan nilai sebesar 4.74, untuk wilayah adat mamta kota Jayapura dengan nilai kemandirian sebesar 11.99, Wilayah adat sireri Kabupaten Biak numfor yang memiliki tingkat kemandirian tertinggi sebesar 6.72, Wilayah adat Mepago, kabupaten Mimika dengan tingkat kemandirian tertinggi sebesar 11.52. Wilayah adat Anim Ha kabupaten Merauke dengan tingkat kemandirian tertinggi sebesar 6.79. Dari hasil analisis diatas dapat di simpulkan kabupaten yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi yang mewakili wilayah adatnya masing-masing pada umumnya adalah kabupaten induk dan memang merupakan pusat dari pemerintahan dari wilayah pemekaran lainnya.

Gambar 1.
Pertumbuhan Rata –rata Tingkat Kemandirian (PAD) di Provinsi Papua Berdasarkan Kabupaten di Wilayah Adat dari Tahun 2012 - 2017



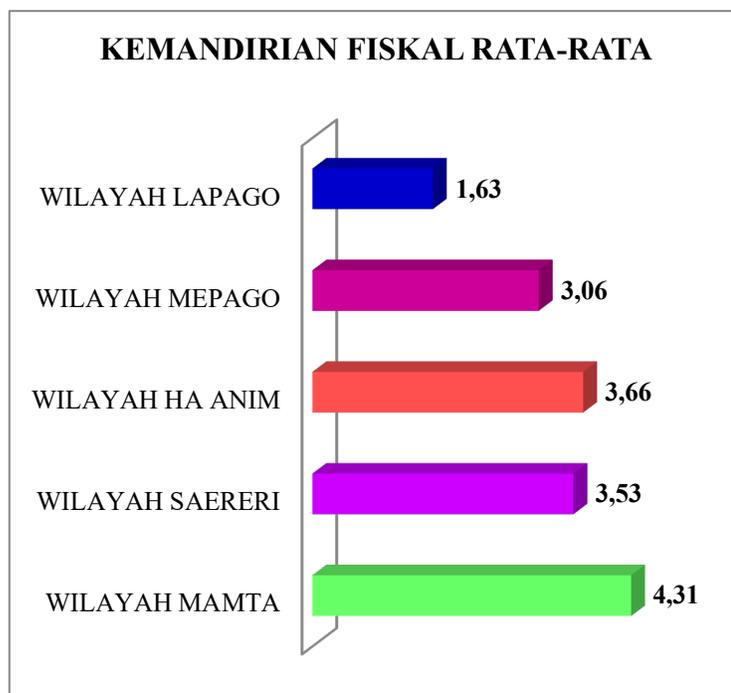
Sumber: Data diolah 2018

Gambar 1 menjelaskan pertumbuhan rata rata tingkat kemandirian fiscal dilima wilayah adat dari tahun 2012 – 2017, wilayah adat Mamta memiliki tingkat kemandirian yang paling tinggi yaitu sebesar 4.31 peringkat kedua adalah wilayah adat Anim Ha dengan tingkat kemandirian 3.66, diikuti wilayah Sireri dengan nilai 3.53 dan Meepago dengan nilai 3.06

sedangkan wilayah adat Lapago memiliki tingkat kemandirian terendah yaitu dengan nilai 1.63, hal ini bisa terjadi karena masing masing wilayah memiliki potensi ekonomi yang berbeda dengan tingkat kemahalan harga yang bervariasi, tingkat keamanan yang belum stabil serta tingkat kesulitan dalam transportasi yang belum didukung dengan infrastruktur yang baik serta alokasi pendapatan dan belanja yang berbeda.

Tingkat kemandirian yang mengacu pada kabupaten berbeda dengan tingkat kemandirian yang mengacu pada pendekatan wilayah adat. Pada tingkat kemandirian kabupaten nilai tertinggi yang dicapai sebesar 11.99 sedangkan pada tingkat kemandirian dengan pendekatan wilayah adat tingkat kemandirian tertinggi hanya sebesar 4.31. hal ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat kemandirian yang sangat tinggi antar kabupaten. Yang artinya ada ketidakmerataan dalam kemandirian daerah. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah provinsi untuk dapat memperbaiki strategi kebijakan percepatan pembangunan di Papua yang berdasarkan pada lima wilayah adat. Agar wilayah kabupaten yang memiliki tingkat kemandirian rendah dapat mengejar untuk dapat meningkatkan kemandirian daerahnya. Dengan cara mengali potensi ekonomi yang ada di daerah masing – masing agar dapat di kembangkan menjadi potensi pendapatan daerah.

Gambar 2.
**Pertumbuhan Rata –rata Tingkat Kemandirian (PAD) di Provinsi Papua
di Lima Wilayah Adat dari Tahun 2012 - 2018**



Sumber: data diolah 2018

Analisis komparatif pertumbuhan pendapatan di lima wilayah adat menggunakan pendekatan analisis kinerja dan kemampuan keuangan daerah khususnya analisis kinerja pendapatan daerah. **Yang kedua adalah analisis tingkat ketergantungan.**

Analisis tingkat ketergantungan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Rasio antara Jumlah dana perimbangan di bagi dengan total pendapatan, dimana dana perimbangan terdiri dari dana DAU, DAK dan DBH.

Dana perimbangan adalah dana yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi khusus

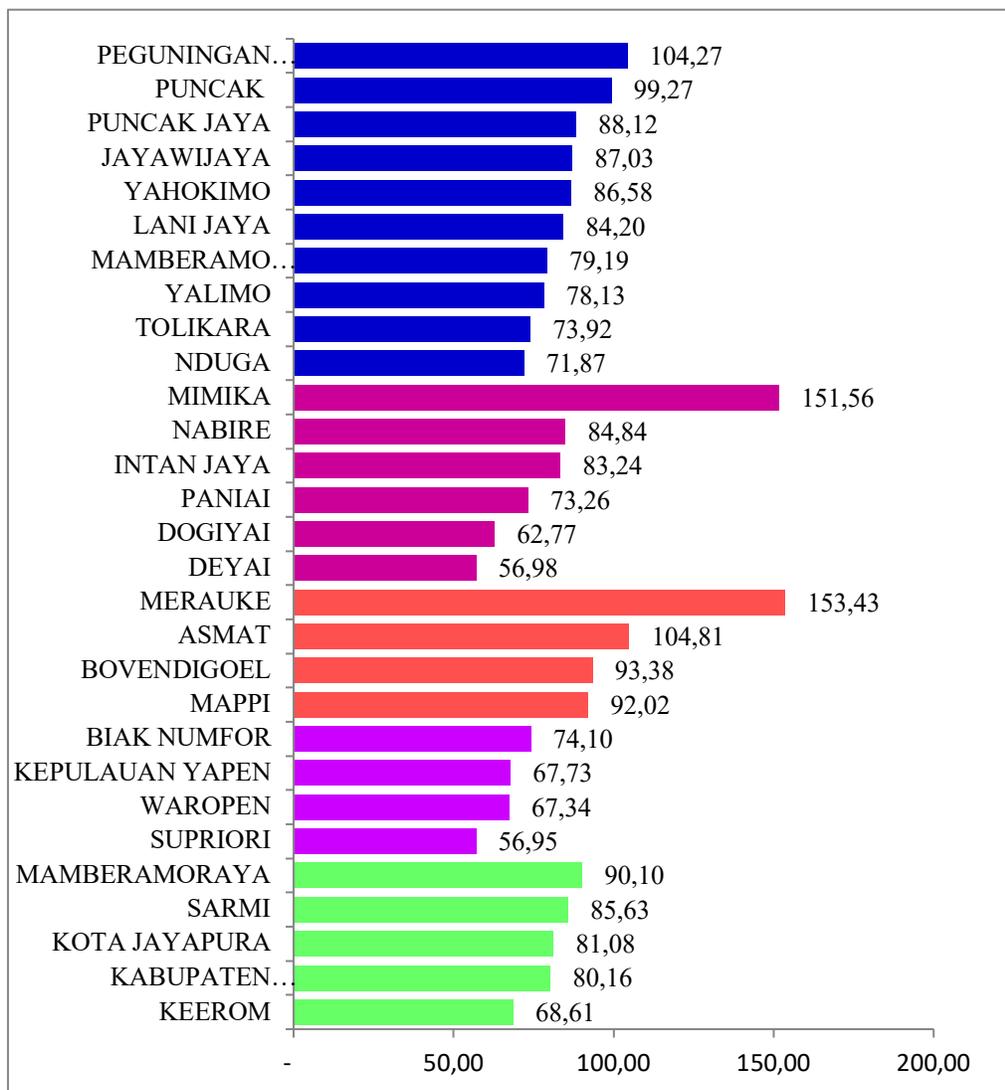
(DAK) dan dana alokasi umum (DAU) kabupaten/Kota di Provinsi dari tahun 2012 – 2018. Dana alokasi umum (DAU) adalah sejumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom di Indonesia sebagai dana pembangunan yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah.

Dana bagi hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bersumber dari: pajak penghasilan perseorangan (PPh), PBB, BPHTP dan penerimaan dari sumber daya.

Gambar 5.3 menjelaskan bagaimana pertumbuhan rata –rata Alokasi dana perimbangan di Provinsi Papua dari tahun 2012 – 2018 yang terdiri dari semua kabupaten di wilayah lima adat yaitu, MAMTA, Sireri, Meepago, Lapago dan Anim Ha. Kabupaten Merauke dengan pertumbuhan rata –rata Alokasi dana perimbangan 153.43 yang merupakan wilayah adat Anim Ha memiliki tingkat pertumbuhan rata –rata Alokasi dana perimbangan tertinggi sedangkan Kabupaten Supiori dengan pertumbuhan rata –rata Alokasi dana perimbangan 56.95 yang merupakan bagian dari wilayah adat Sireri memiliki tingkat pertumbuhan rata –rata Alokasi dana perimbangan yang terendah.

Di Wilayah adat lapago kabupaten Pegunungan Bintang memiliki pertumbuhan rata –rata Alokasi dana perimbangan yang tertinggi dengan nilai sebesar 104.27, untuk wilayah adat Mamta Kabupaten Mamberamo Raya dengan nilai pertumbuhan rata –rata Alokasi dana perimbangan sebesar 90.10, Wilayah adat Sireri Kabupaten Biak numfor yang memiliki pertumbuhan rata –rata Alokasi dana perimbangan tertinggi sebesar 74.10, Wilayah adat Mepago, kabupaten Mimika dengan tingkat pertumbuhan rata –rata Alokasi dana perimbangan tertinggi sebesar 151.56 Wilayah adat Anim Ha kabupaten Merauke dengan tingkat pertumbuhan rata –rata Alokasi dana perimbangan sebesar 154.43. Dari hasil analisis diatas dapat di simpulkan kabupaten yang memiliki tingkat pertumbuhan rata –rata alokasi dana perimbangan yang tinggi yang mewakili wilayah adatnya masing-masing pada umumnya adalah kabupaten yang sedang dalam proses pembangunan yang membutuhkan dana yang banyak agar bisa membiayai pembangunannya.

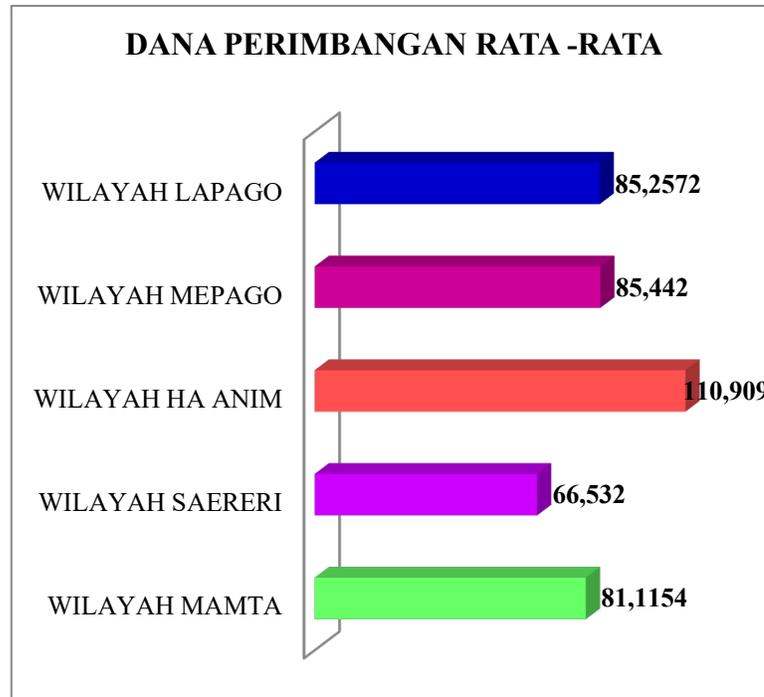
Gambar 3.
Pertumbuhan Rata –rata Alokasi Dana Perimbangan di Provinsi Papua
Berdasarkan Kabupaten di Lima Wilayah Adat dari Tahun 2012 - 2018



Sumber: data diolah 2018

Gambar 4 menjelaskan pertumbuhan rata rata alokasi dana perimbangan dilima wilayah adat dari tahun 2012 – 2017, wilayah adat Anim Ha memiliki tingkat ketergantungan yang paling tinggi yaitu sebesar 110.909 peringkat kedua adalah wilayah adat Meepago dengan tingkat ketergantungan 85.442 , diikuti wilayah Lapago dengan nilai 85.25 dan Mamta dengan nilai 81.11 sedangkan wilayah adat Sireri memiliki tingkat ketergantungan terendah yaitu dengan nilai 66.53 hal ini bisa terjadi karena masing masing wilayah memiliki potensi ekonomi yang berbeda dengan tingkat kemahalan harga yang bervariasi, tingkat keamanan yang belum stabil serta tingkat kesulitan dalam transportasi yang belum didukung dengan infrastruktur yang baik serta alokasi pendapatan dan belanja yang berbeda.

Gambar 4.
Pertumbuhan Rata –rata Alokasi Dana Perimbangan di Provinsi Papua
di Lima Wilayah Adat dari Tahun 2012 - 2018



Sumber: Data diolah 2018

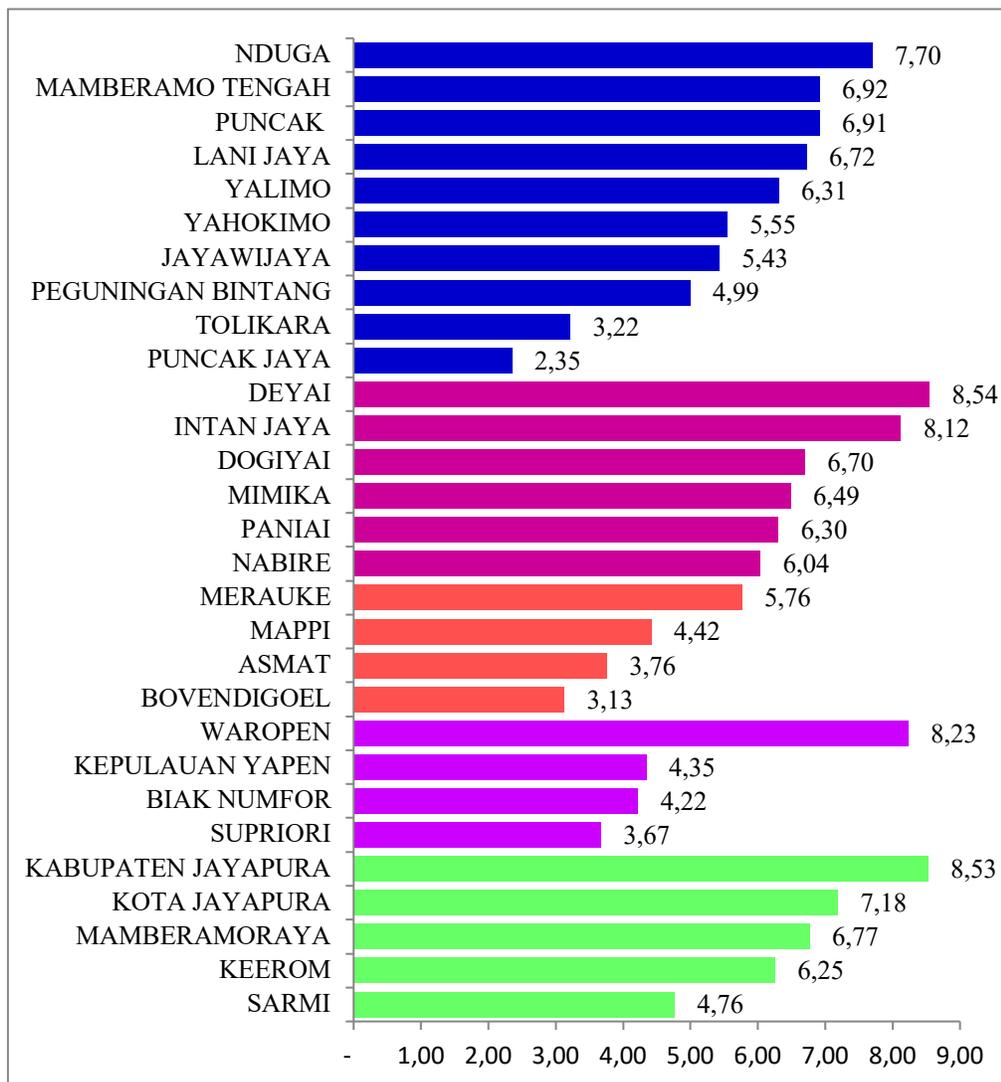
Pertumbuhan rata rata alokasi dana perimbangan yang mengacu pada kabupaten memiliki kecenderungan yang sama dengan pertumbuhan rata rata alokasi dana perimbangan yang mengacu pada pendekatan wilayah adat. Pada pertumbuhan rata rata alokasi dana perimbangan Kabupaten Merauke nilai tertinggi yang dicapai sebesar 153.43 pada wilayah adat Anim HA sedangkan pada tingkat pertumbuhan rata rata alokasi dana perimbangan dengan pendekatan wilayah adat Anim Ha tingkat kemandirian tertinggi hanya sebesar 110.909. hal ini menunjukkan adanya kesamaan dalam pertumbuhan rata rata alokasi dana perimbangan antar kabupaten. Yang artinya ada wilayah adat tertentu yang memang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah provinsi untuk dapat memperbaiki strategi kebijakan percepatan pembangunan di Papua yang berdasarkan pada lima wilayah adat. Agar wilayah kabupaten yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dapat mengurangi tingkat ketergantungannya. Dengan cara mengali potensi ekonomi yang ada didaerah masing – masing agar dapat di kembangkan menjadi potensi pendapatan daerah.

Analisis komparatif pertumbuhan pendapatan di lima wilayah adat menggunakan pendekatan analisis kinerja dan kemampuan keuangan daerah khususnya analisis kinerja pendapatan daerah. **Yang ketiga adalah analisis pertumbuhan ekonomi.**

Pertumbuhan Ekonomi dalam penelitian ini di peroleh dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dimasing masing kabupaten di Propinsi Papua yang berdasarkan Lima Wilayah adat dari tahun 2012 – 2017. dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Peningkatan PDRB Riil yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran yang penting untuk menilai keberhasilan bari pembangunan ekonomi dan meningkatkan peningkatan pendapatan

perkapita Riil pada satu tahun tertentu, merupakan salah satu ukuran kemajuan perekonomian suatu daerah.

Gambar 5.
Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata (PDRB) di Provinsi Papua
Berdasarkan Kabupaten di Lima Wilayah Adat dari Tahun 2012 - 2018



Sumber: data diolah 2018

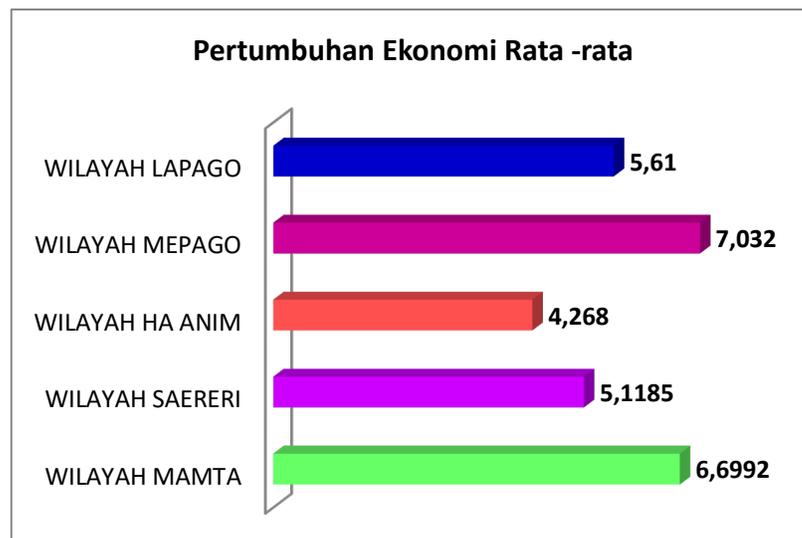
Gambar 5 menjelaskan bagaimana Pertumbuhan ekonomi rata-rata di Provinsi Papua dari tahun 2012 – 2017 yang terdiri dari semua kabupaten diwilayah lima adat yaitu, MAMTA, Sireri, Meepago, Lapago dan Anim Ha. Kabupaten Jayapura dengan Pertumbuhan ekonomi rata-rata 8.53 yang merupakan wilayah adat Mamta memiliki tingkat Pertumbuhan ekonomi rata-rata tertinggi sedangkan Kabupaten Puncak Jaya dengan tingkat Pertumbuhan ekonomi rata-rata 2.35 yang merupakan bagian dari wilayah adat Lapago memiliki tingkat Pertumbuhan ekonomi rata-rata yang terendah. Hal ini bisa disebabkan karena banyak faktor salah satunya adalah Kabupaten Jayapura merupakan pusat pemerintahan sedangkan Kabupaten Puncak Jaya merupakan daerah pemekaran baru.

Di Wilayah adat lapago kabupaten Nduga memiliki tingkat Pertumbuhan ekonomi rata-

rata yang tertinggi dengan nilai sebesar 7.70, untuk wilayah adat mamta kabupaten Jayapura dengan nilai Pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 8.53, Wilayah adat sireri Kabupaten Waropen yang memiliki tingkat Pertumbuhan ekonomi rata-rata tertinggi sebesar 8.23, Wilayah adat Mepago, kabupaten Deyai dengan tingkat Pertumbuhan ekonomi rata-rata tertinggi sebesar 8.54. Wilayah adat Anim Ha kabupaten Merauke dengan tingkat Pertumbuhan ekonomi rata-rata tertinggi sebesar 5.76. Dari hasil analisis diatas dapat di simpulkan kabupaten yang memiliki tingkat Pertumbuhan ekonomi rata-rata yang tinggi yang mewakili wilayah adatnya masing-masing pada umumnya adalah kabupaten pemekaran baru dan Kabupaten yang memiliki system transportasi yang cukup lancer seperti kabupaten Jayapura dan Merauke.

Gambar 5.6 menjelaskan pertumbuhan ekonomi rata rata dilima wilayah adat dari tahun 2012 – 2017, wilayah adat Mepago memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi yaitu sebesar 7.032 peringkat kedua adalah wilayah adat Mamta dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 6.69 , diikuti wilayah Lapago dengan nilai 5.61 dan Sireri dengan nilai 5.11 sedangkan wilayah adat Anim Ha memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi terendah yaitu dengan nilai 4.26 hal ini bisa terjadi karena masing masing wilayah memiliki potensi ekonomi yang berbeda dengan tingkat kemahalan harga yang bervariasi, tingkat keamanan yang belum stabil serta tingkat kesulitan dalam transportasi yang belum didukung dengan insfrastruktur yang baik serta alokasi pendapatan dan belanja yang berbeda.

Gambar 6.
Pertumbuhan Ekonomi Rata –rata (PDRB) di Provinsi Papua
di Lima Wilayah Adat dari Tahun 2012 – 2018



Sumber: data diolah 2018

Strategi Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Papua di Lima Wilayah Adat.

Implementasi strategi kebijakan di pandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi secara luas di pandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan-tujuan kebijakan, Atau program-program.

Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat di pahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome). Tujuan-tujuan yang telah di rencanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja suatu program.

Akhirnya, pada tingkat abstrasi yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa di ukur dalam masalah yang luas yang di kaitkan dengan program, undang-undang publik, dan keputusan yudisial.

Strategi Kebijakan pembangunan pemerintah Provinsi Papua yang di kutip dalam laporan BAPPEDA Provinsi adalah sebagai berikut:

Visi Propinsi Papua dalam rangka meningkatkan pembangunan di Papua adalah: Papua Bangkit, Papua Mandiri dan Papua Sejahtera dengan prinsip dasar: Kasih Menembus perbedaan.

Misi Pembangunan adalah: Mewujudkan suasana aman, tentram dan nyaman; Tata kelola emerintah yang baik, bersih dan berwibawa serta penguatan otonomi khusus: Berkualitas sumberdaya manusia papua yang sehat, berprestasi dan berakhlak mulia: Peningkatan taraf ekonomi masyarakat yang berbasis potensial local: Percepatan pembanguan infrastruktur dan konektivitas daerah.

Strategi Pengembangan Wilayah:

1. Mendorong percepatan wilayah dengan membagi wilayah pembangunan berdasarkan 5 (Lima) wilayah adat yaitu: 1. Wilayah adat Mamta, 2. Wilayah adat Sireri, 3. Wilayah adat Anim Ha, 4. Wilayah adat Lapoago, 5. Wilayah adat Mee pago.
2. Mendorong pertumbuhan wilayah – wilayah potensial diluar wilayah mamta dan Sireri dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah mamta dan Sireri
3. Meningkatkan keterkaitan antar wilayah melalui peningkatan perdagangan antar kawasan dan antar daerah untuk mendukung perekonomian domestic
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan komoditas unggulan di tiap wilayah
5. Mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar, dan daerah rawan konflik dan rawan bencana.

Tema Pembangunan Tahun 2018: “Perluasan peningkatan kualitas hidup dan pemantapan kemandirian daerah yang berdaya saing, merata dan berkelanjutan.

Arah Kebijakan Pembangunan Tahun pertama (2014)

Arah kebijakan pembangunan Gerakan bangkit mandiri dan sejahtera tahun pertama difokuskan pada upaya untuk mendorong pembangunan di 5 (lima) Kabupaten yaitu: Keerom, Supiori, Boven Digoel, Deiyai dan Lany Jaya, dengan prioritas pembangunan pada 4 (empat) Bidang Utama:

- 1) Pengembangan potensi unggulan daerah sesuai potensi yang ada di kampung-kampung dan distrik;
- 2) Penciptaan dan pengelolaan industri berbasis integrasi lintas daerah dan antar sektor;
- 3) Penyediaan dukungan bagi usaha-usaha kreatif masyarakat baik formal maupun informal;
- 4) Pembangunan infrastruktur menghubungkan sentra-sentra ekonomi masyarakat;

Arah Kebijakan pembangunan tahun ke dua (2015)

Arah kebijakan pembangunan tahun kedua merupakan lanjutan dari tahun pertama dengan fokus dan fokus yang berbeda pada beberapa kabupaten yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan pembangunan terpadu tahap kedua di 3 (tiga) Kabupaten lainnya yaitu: Puncak Jaya, Tolikara, Pegunungan Bintang,

- 1) Pengembangan potensi unggulan daerah sesuai potensi yang ada di kampung-kampung dan distrik;
- 2) Penciptaan dan pengelolaan industri berbasis integrasi lintas daerah dan antar sektor;
- 3) Penyediaan dukungan bagi usaha-usaha kreatif masyarakat baik formal maupun informal;
- 4) Pembangunan infrastruktur menghubungkan sentra-sentra ekonomi masyarakat;
- 5) Pembangunan pasar mini di ibukota distrik;
- 6) Pembangunan minimarket di Ibukota Distrik;

- 7) Pembangunan dan Pengelolaan hasil produksi dan kerajinan masyarakat yang berorientasi ekspor;

Arah Kebijakan Pembangunan tahun ke tiga (2015)

Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga dilaksanakan untuk mengarahkan pembangunan terpadu pada fokus dan lokus yang berbeda pada beberapa kabupaten yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan pembangunan terpadu di 4 (empat) Kabupaten yaitu: Yahukimo, Yalimo, Sarmi,

- 1) Pengembangan potensi unggulan daerah sesuai potensi yang ada di kampung-kampung dan distrik;
- 2) Penciptaan dan pengelolaan industri berbasis integrasi lintas daerah dan antar sektor;
- 3) Penyediaan dukungan bagi usaha-usaha kreatif masyarakat baik formal maupun informal;
- 4) Pembangunan infrastruktur menghubungkan sentra-sentra ekonomi masyarakat;
- 5) Pembangunan pasar mini di ibukota distrik;
- 6) Pembangunan minimarket di Ibukota Distrik;
- 7) Pembangunan dan Pengelolaan hasil produksi dan kerajinan masyarakat yang berorientasi ekspor;

Arah kebijakan pembangunan tahun ke empat (2017)

Arah kebijakan pembangunan tahun kedua merupakan lanjutan dari tahun pertama dengan fokus dan lokus yang berbeda pada beberapa kabupaten yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan pembangunan terpadu di 3 (tiga) Kabupaten yaitu: Mappi, Paniai, waropen

- 1) Pengembangan potensi unggulan daerah sesuai potensi yang ada di kampung-kampung dan distrik;
- 2) Penciptaan dan pengelolaan industri berbasis integrasi lintas daerah dan antar sektor;
- 3) Penyediaan dukungan bagi usaha-usaha kreatif masyarakat baik formal maupun informal;
- 4) Pembangunan infrastruktur menghubungkan sentra-sentra ekonomi masyarakat;
- 5) Pembangunan pasar mini di ibukota distrik;
- 6) Pembangunan minimarket di Ibukota Distrik;
- 7) Pembangunan dan Pengelolaan hasil produksi dan kerajinan masyarakat yang berorientasi ekspor

Arah Pembangunan tahun kelima (2018)

Arah kebijakan pembangunan tahun kelima difokuskan pada bidang/sektor yang masih perlu ditingkatkan pencapaiannya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian program prioritas yang telah dilaksanakan selama 4 tahun terakhir pada program dan kegiatan pada BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI umat.

Faktor –faktor yang Mempengaruhi implementasi dari suatu kebijakan adalah:

1. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah **perubahan organisasi** yang di perlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan reorganisasi secara drastis.
2. Beberapa kesulitan besar untuk **mengidentifikasi dan mengatur kinerja**, ada dua penyebab yang di kemukakan van meter & van horn **Pertama**, mungkin disebabkan oleh bidang program yang terlalu luas dan sifat tujuan yang terlalu kompleks, **Kedua** mungkin akibat dari keabur-kaburan dan kontradiksi-kontradiksi dalam pernyataan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan Suatu Program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil bila tujuan-tujuan tidak dipertimbangkan
3. **Sumber-sumber yang tersedia**. Sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (incentive) dapat memperlancar implementasi yang efektif
4. **Karakteristik-karakteristik badan-badan pelaksana**; Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dalam meneruskan pesan-pesan ke bawah dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpangkannya atau menyebar luaskan, baik secara sengaja atau tidak sengaja.

- Menurut Van meter & Van horn Implementasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga
5. Para pejabat dalam struktur organisasi mempunyai kekuasaan personal yang diukur dari: **Pertama**, rekrutmen dan seleksi; **Kedua**, penugasan dan reklorasi; **Ketiga**, kenaikan pangkat; **Keempat**, akhirnya pemecatan. Untuk menanggapi pencapaian kebijakan yang memuaskan atau tidak memuaskan, selain itu juga para pejabat-pejabat ini mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku bawahan.
 6. Dalam hubungan antar organisasi maupun antar pemerintah, dua **tipe kegiatan pelaksanaan** yang paling penting. **Pertama**, nasihat dan bantuan teknis yang dapat diberikan; **Kedua**, atasan dapat menyandarkan pada berbagai sanksi, baik positif maupun negatif. Menurut van meter dan van horn kita dapat menyelidiki aspek pelaksanaan ini dengan menunjuk kepada perbedaan antara **kekuasaan normative, renumeratif, dan kekuasaan koefsif**.
 7. Lingkungan ekonomi, social dan politik yang mempengaruhi yuridiksi atau organisasi implementasi dan kecenderungan para pelaksana.

Beberapa Teknik agar implemenatsi kebijakan agar dapat sesuai dengan yang diharapkan, Sejumlah alat atau cara digunakan oleh para implementor agar undang-undang publik bisa diimplementasikan sesuai dengan kehendak kongres dan / atau birokrasi. Ada dua perdebatan yang memfokuskan pada dua pendekatan:

1. Pendekatan perintah dan pengawasan
2. Pendekatan insentif ekonomi atau pasar.

Pendekatan perintah dan pengawasan meliputi penggunaan mekanisme-mekanisme yang sedikit koersif, seperti pembentukan standar atau aturan baku, inspeksi dan pengenaan sanksi terhadap para pelanggar yang tidak mau mematuhi arahan federal.

Pendekatan insentif ekonomi mencakup penggunaan kredit pajak, subsidi, atau ganjaran lain atau pinalti untuk mendorong kepentingan-kepentingan swasta supaya mematuhi aturan.

Singkatnya, apapun pendekatan yang digunakan pada akhirnya tergantung pada keyakinan baik antara berbagai **aktor yang terlibat** dalam implementasi. Tidak ada pola untuk kepatuhan bisa berjalan, jika para pelaksana atau implementor dan mereka yang disertai kepatuhan tidak **sepakat mengenai tujuan-tujuan** implementasi. Tujuan-tujuan implementasi perlu mencakup **bargaining dan negosiasi** antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk kepentingan-kepentingan masyarakat yang lebih luas yang dipengaruhi oleh tujuan-tujuan dan aturan-aturan baku ini.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Analisis Komparatif Pertumbuhan Pendapatan Daerah di lima Wilayah Adat Provinsi Papua dari Tahun 2013 – 2018. Yang dianalisis dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu tingkat kemandirian, tingkat ketergantungan dan pertumbuhan ekonomi adalah:
 - a. Menunjukkan adanya perbedaan tingkat kemandirian yang sangat tinggi antar lima wilayah adat, Mamta dengan Kota Jayapura memiliki tingkat kemandirian yang tinggi. Yang artinya ada ketidakmerataan dalam kemandirian daerah. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah provinsi untuk dapat memperbaiki strategi kebijakan percepatan pembangunan di Papua yang berdasarkan pada lima wilayah adat. Agar wilayah kabupaten yang memiliki tingkat kemandirian rendah dapat mengejar untuk dapat meningkatkan kemandirian daerahnya
 - b. Menunjukkan adanya kesamaan dalam pertumbuhan rata rata alokasi dana perimbangan antar kabupaten. Yang artinya ada wilayah adat tertentu yang memang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi di lima wilayah adat. Ha Anim dengan Kabupaten Merauknya memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi, Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah provinsi untuk dapat memperbaiki strategi kebijakan percepatan pembangunan

di Papua yang berdasarkan pada lima wilayah adat. Agar wilayah kabupaten yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dapat mengurangi tingkat ketergantungannya

- c. Dari hasil analisis diatas dapat di simpulkan kabupaten yang memiliki tingkat Pertumbuhan ekonomi rata-rata yang tinggi yang mewakili wilayah adatnya masing-masing pada umumnya adalah kabupaten pemekaran baru seperti Mepago dengan kabupaten Deyai-nya dan Kabupaten yang memiliki system transportasi yang cukup lancer seperti kabupaten Jayapura dan Merauke
2. Analisis Strategi Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Papua di Lima Wilayah Adat, adalah apapun pendekatan yang digunakan pada akhirnya tergantung pada keyakinan baik antara berbagai **aktor yang terlibat** dalam implementasi. Tidak ada pola untuk kepatuhan bisa berjalan, jika para pelaksana atau implementor dan mereka yang disertai kepatuhan tidak **sepakat mengenai tujuan-tujuan** implementasi. Tujuan-tujuan implementasi perlu mencakup **bargaining dan negosiasi** antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk kepentingan-kepentingan masyarakat yang lebih luas yang dipengaruhi oleh tujuan-tujuan dan aturan-aturan baku ini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, disarankan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah dan pemerintah Provinsi harus bersama – sama mengoptimalkan penerimaan daerah dari potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing – masing daerah. Pemerintah daerah harus mencari alternative -alternative yang memungkinkan untuk dapat meningkatkan kemandirian fiskal, mengurangi tingkat kemandirin dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Pemerintah daerah kabupaten dan kota Provinsi Papua diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing agar produktivitas semakin tinggi, sehingga berpengaruh terhadap kemandirian fiskal dan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat ketergantungan daerah.
3. Pemerintah harus memperbaiki koordinasi, komunikasi untuk dapat mewujudkan strategi kebijakan yang telah di putuskan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Helmi, (2008). Peranan Belanja Dan Penerimaan Daerah Dalam Peningkatan Perekonomian Daerah Provinsi Riau, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume 7 Nomor 2 September 2008, Riau;
- Brannen, Julia. (2005). Memandu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Edisi terjemahan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta;
- Edward Panggabean. (2014). <http://news.liputan6.com/asian-agri-groupakhirnya-lunasi-cicilan-denda-rp-25-triliun>;
- Fahmi Rizani, dkk., (2011), Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Daerah Pemerintah Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, Jurnal Ekonomi Pembangunan Manajemen dan Akuntansi, Vol..10, No. 1 April 2011, LPSTE FE Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin;
- Jitmau Yuliana, Iek Mesak, dan Ngutra R. Novan. (2018). Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Guna Menunjang Kemandirian Fiskal Kabupaten Mamberamo Tengah. Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan. Volume V No. 1, April 2018;
- Marina, Irayani. (2006). Analisa Penerimaan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 1999/2000-2003 (Studi Komparatif Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah). Skripsi (Tidak Dipublikasi), Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta;
- Neuman, W Laurence. (2013). Metodologi Penelitian Sosial; Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Edisi terjemahan. Indeks. Jakarta;
- Permatasari, Ingggrid; Laksito, H. (2013). Meminimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). Diponegoro Journal of Accounting Vol. 2 No.2;

- Purwadi, M. A. (2019). Special Autonomy Papua: Compliance Against Applicable Rules/Guidelines (Case Study in Jayapura City). *Papua Law Journal*, 2(1), 67-84.
- Rahayu & Siti, Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia Edisi Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu;
- Rahman & Irma Suryani. (2013). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak 42;
- Ramona, Gita, Poluan, (2010). Pengaruh Penerapan dari penerapan PP 51/2008 jo. PP 40/2009 terhadap beban pajak dan laba bersih perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, FE UI Jakarta;